

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sistem pengendalian intern di Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini dapat dilihat unsur-unsur sistem pengendalian intern penerimaan kas yang diterapkan yaitu:

1. Sistem pengendalian Intern Penerimaan Kas pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT telah efektif dan memadai menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008.
2. Lingkungan pengendalian
Sudah diterapkan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT berjalan dengan baik
3. Penilaian Risiko
Dalam penilaian risiko, masih terdapat risiko yang diidentifikasi dalam penerimaan kas yaitu kurangnya ketelitian, salah pencatatan, salah perjurnalan, salah pelaporan.
4. Aktivitas Pengendalian
Mulai dari review kerja sampai dengan akuntabilitas sumber daya sudah dilakukan secara efektif dan baik.
5. Informasi dan komunikasi
Sudah memadai, dimana pemerintah memberikan informasi secara harian tentang penerimaan kas melalui kas daerah.
6. Pemantauan, sudah dilaksanakan secara baik sehingga tidak perlu

pertanggungjawaban penuh dalam usaha pengawasan internal terhadap penerimaan kas.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka disarankan kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, untuk memperhatikan unsur-unsur sistem pengendalian intern penerimaan kas yaitu:

1. Dalam kegiatan pengendalian Pengangkatan pegawai pada jabatan tertentu sebaiknya secara objektif sesuai dengan kemampuan dan keahliannya kepada para pegawai agar dapat menghasilkan SDM yang kompeten, sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan yang baik, dengan begitu dapat tercipta sistem pengendalian intern yang lebih baik.
2. Perlunya dilakukan analisis risiko dengan menerapkan kebijakan untuk memastikan berkurangnya risiko yang telah teridentifikasi pada penilaian risiko.
3. Untuk kegiatan pemantuan dalam pelaksanaan penerimaan dana transfer harus memonitor secara rutin atau bukti/laporan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga bias mencapai target.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi Tujuh, Jilid 1, Erlangga, Jakarta.*
- Fenny, 2011 *Analisis Efektifitas Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pada Bank Permata Manado Sudah Efektif.*
- Idhar, 2011 *Analisis Sistem Pengawasan Intern Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kab, Minahasa*
- Marshall, Romney B, dan John Steinbart, 2005. *Sistem Informasi Akuntansi, Buku 1, Edisi Sembilan, Terjemahan Salemba Empat, Jakarta.*
- Mulyadi, 2001. *Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Salemba Empat, Jakarta.*
- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta.*
- Hariadi, (2010) tentang *Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 232 ayat (3).*
- Kaligis Gabriella Margaretha, Ventje Ilat, Winston Pontoh, 2015. *Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.*
- Peraturan Daerah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2005 tentang *pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah.*
- Permedagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang *Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.*
- Undang-Undang No 20 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah dan UU No 25 Tahun tentang Perkembangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara pasal 35 ayat (2).*

Vana Peggie Tandaju, Inggriani Elim, 2015. *Evaluasi Penerapan Pengendalian Intern Siklus Penerimaan Kas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.*

Wiliam Boynton C. dkk, 2003. *Accounting-Modern Auditing, Edisi Ketujuh.* Erlangga, Jakarta.

Wowor, 2015. *Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Kas pada DPPKAD Kota Tomohon.*